

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, J. (2017). *Analisis kinerja keuangan, kemampuan keuangan dan evaluasi anggaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sijunjung*. *Open Science Framework*, 1–20.
- Bisma, D. G. D. E., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Chasanah, S. N., & Panjawa, J. L. (2020). Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(September), 151–173.
- Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *EKBIS*, X(2), 677–689.
- Effendi. (2019). *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Eprints Mercubuana Yogyakarta.
- Farhani, F., & Rosnidah, I. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 3, 1–18.
- Febryan. (2011). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal". *UNNES Repository*.
- Koesarieyanto, & Ervina, L. D. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Penganggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Revitalisasi (Ilmu Manajemen)*, 04(September), 10–20.
- Muhajirin. (2019). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Electronic Theses UIN Malang*.
- Mustarim, I., Rosnawintang, & Akib, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 4(9), 1–19.
- Nanda, R. (2016). Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 327–340.
- Ningtias, Y. D., Nugroho, T. R., & Ainiyah, N. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja*

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016. Repository UNIM, 1–12.

- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability, 06*, 45–56.
- Putri, H. E. (2017). Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekon, 4*.
- Rahman, N., Naukoko, A., & Londah, A. (2014). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). *Berkala Ilmiah Efisiensi, 14*(3), 56–70.
- Rosyidah, A., Nugroho, T. R., & Dwihandoko, T. H. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2016. Repository UNIM, 23*, 1–12.
- Santoso, E. (2011). *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi. Digital Library UNS*.
- Septria, D., & Heryanto. (2019). Performance Capability Analysis And Regional Budget Evaluation In Implementing Regional Autonomy In Dharmasraya District. *Archives of Business Research, 7*(7), 180–187.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik, 2*(32), 236–242.
- Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Syariah Dan Hukum, 7*, 57–67.
- Tarjunajah, & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se- Jabodetabek. *Jurnal Riset Kuntansi Dan Perpajakan, 5*(2), 175–187.
- Trianto, A. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. Jurnal Akuntansi. 65–77.*
- Yuliastati. (2015). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Katalogis, 4*(12), 197–208.

- Zuhri, M., & Soleh, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review*, 187–195.
- Zukhri, N. (2020). *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal*. *Indonesia Treasury Review*, 5(2020), 143–149.
- Badan pengawasan keuangan dan pembangunan. (2020). *LKPD Kota Pangkalpinang 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kota Pangkalpinang Dalam Angka*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020). *Undang-Undang No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*.
- Menteri Dalam Negeri.(2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (pp. 1–73).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*. 1–240.
- PUPR, K. (2017). Bab 7. *Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017*.